

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdulkadir, Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- Atmasasmita, Romli, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2003
- Dampu, Debora, *Pelaksanaan Perkawinan Antar Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kota Denpasar Provinsi Bali*, Tesis : Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009
- Darmabrata, Wahyono, *Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Pemeliharaan Anak*, Jakarta, 2005
- Gautama, Sudargo, *Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional*, Alumni, Bandung, 1985
- ICAO, *Annex 9 Facilitaion Twelfth Edition*, ICAO Publications, 2005
- Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian*, ST1A-LAN, Jakarta, 1999
- Indra, Muhammad, *Perspektif Penegakan Hukum Dalam Hukum Keimigrasian Indonesia*, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2010
- Jehani, Libertus dan Atanasius Harpen, *Hukum Kewarganegaraan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002
- Nosanchuk, Erickson, *Understanding Data Second Edition*, Oxford: McGraw Hill House, 1996
- Nowak, Manfred, *Pengantar Pada Rezim HAM Internasional*, Pustaka Hak Asasi Manusia Raoul Wallenberg Institute, 2003

- Perruchoud, Richard, *International Migration Law - Glossary On Migration*, Geneva: IOM, 2006
- Prodjodikoro, Wiryo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1974
- Santoso, Iman, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2004
- Starke, J.G, *Introduction to International Law, Tenth Edition*, Bambang Iriana Djajaatmadja (Terj.) Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta, 1996
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2006
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, UI Press, Jakarta, 2001
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hak Asasi Manusia, Konsep Dasar dan Perkembangan pengertiannya dari Masa ke Masa*, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XVI tahun 2007, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal
- Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.09-IZ.03.10 Tahun 2006 tentang Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Subyek Kewarganegaraan Ganda

Terbatas Yang Lahir Sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.01.13-056 Tahun 2010 Tentang Alih Status Keimigrasian Dalam Rangka Menggabungkan Diri Dengan Suami Atau Istri Warga Negara Indonesia

Surat Edaran Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Nomor IMI3-UM.01.13-1.0404 tanggal 16 Agustus 2011 Tentang Penelitian Permohonan Untuk Alih Status Berdasarkan Perkawinan Antara Suami/Istri WNA Dengan Istri/Suami WNI

Surat Edaran Nomor IMI-GR.03.02-0224 Tahun 2014 Tentang Penghapusan Kewajiban Pendaftaran Orang Asing

Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-2971-GR.01.13 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Alih Status Izin Tinggal Terbatas Menjadi Izin Tinggal Tetap Bagi Orang Asing Yang Kawin Secara Sah Dengan Warga Negara Indonesia

### **C. SUMBER LAINNYA**

<http://bolmerhutasoit.wordpress.com/2011/10/07/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum-menurut-gustav-radbruch/> diunduh pada tanggal 29 Mei 2015

Wawancara dengan Hattor Tampubolon, Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Polonia, tanggal 28 April 2015

Wawancara dengan Oeray Gufran Maryudha, Kepala Seksi Status Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Polonia, tanggal 30 April 2015